

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Ketimpangan wilayah di Provinsi Sumatera Utara berada dalam kesenjangan level tinggi. Dari tahun 2010 sampai dengan 2019, Indeks Williamson selalu menunjukkan angka diatas $IW > 0,5$. Dengan demikian tujuan pemerintah dalam pemerataan pembangunan dan perekonomian selama 10 tahun terakhir masih jauh dari yang diharapkan.
2. Ketimpangan wilayah di kabupaten/kota cukup bervariasi selama kurun waktu tahun 2010-2019. Hal ini disebabkan pengaruh yang signifikan ketimpangan wilayah terhadap Pengeluaran Pemerintah, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif terhadap ketimpangan, artinya semakin besar pengeluaran pemerintah menyebabkan kenaikan tingkat ketimpangan. Daerah dengan APBD yang besar akan mempengaruhi kesenjangan dengan daerah lainnya yang memiliki APBD yang jauh di bawahnya.
3. Besarnya pendapatan daerah dari Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam juga mempengaruhi tingkat ketimpangan di wilayah Sumatera Utara. Secara umum dana bagi hasil sumber daya alam sumber daya alam berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Artinya kenaikan pendapatan yang berasal dari alokasi dana bagi hasil sumber daya alam menyebabkan kenaikan tingkat ketimpangan.
4. Investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Artinya kenaikan pendapatan yang berasal dari investasi menyebabkan tingkat ketimpangan akan menurun. Variabel Investasi berpengaruh signifikan terhadap

ketimpangan di kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara, bahwa besarnya investasi yang di dapat suatu daerah akan mempengaruhi daerah lainnya. Semakin besar kredit yang dikucurkan oleh lembaga keuangan untuk tujuan investasi maka akan menurunkan tingkat ketimpangan.

5. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan wilayah mempunyai arah hubungan yang negatif, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka angka indeks Williamson semakin rendah. Besar hubungan pertumbuhan ekonomi dengan indeks Williamson dapat digolongkan tidak ada korelasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2010-2019.

5.2 Saran

1. Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam penulisan tesis ini. Keterbatasan peneliti adalah penggunaan data variabel investasi. Data investasi yang dibutuhkan peneliti seharusnya adalah investasi PMA dan PMDN tiap kabupaten/kota. Tetapi peneliti tidak berhasil menemukan data tersebut di BPS maupun di instansi terkait. Peneliti juga tidak mampu meneliti kebenaran data indeks *Williamson* Kabupaten/Kota yang dikeluarkan BPS tidak dapat melihat perhitungan dasarnya.
2. Dalam menetapkan kebijakan daerah, pemerintah daerah harus dapat memperhatikan aspek-aspek ketimpangan antar wilayah. Penggunaan APBD dan dana bagi hasil sumber daya alam haruslah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pemerintah daerah seharusnya lebih meningkatkan investasi, menarik investor-investor untuk berinvestasi baik investor dalam negeri maupun luar negeri, karena investasi dapat menurunkan tingkat ketimpangan wilayah.



THE
Character Building
UNIVERSITY